

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 56 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL  
PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan proses penetapan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1.Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**NAMA DAN JABATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PADA  
UNIT KERJA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

<b>No</b>	<b>Nama/NIP/Jabatan Struktural/Fungsional</b>	<b>Jabatan dalam Penugasan</b>
1.	Firmansyah, S.Hut NIP. 19830130 201012 1 001 Penyusun Bahan Perencanaan dan Program	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
2.	Wildan Massani, S.ST NIP. 19780326 200012 1 001 Kepala Subbagian Kas, Perbendaharaan dan Pelaporan Keuangan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Biro Umum dan Keuangan
3.	Yohana Surat Payon Phillips, S.Psi NIP. 19821126 201012 2 001 Calon Analis Kepegawaian	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
4.	Vina Da'watul Aropah, S.E NIP. 19811018 201012 2 001 Penyusun Bahan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
5.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E NIP. 19840503 201012 1 001 Penyusun Bahan Pengadaan Khusus BUMN/BUMD	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
6.	Widya Prima Sari Fultanegara, S.IP NIP. 19870101 201012 2 001 Penyusun Bahan Kerjasama Multilateral	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
7.	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi, SE NIP. 19821101 201012 1 001 Penyusun Bahan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Propinsi dan BUMD	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
8.	Sri Aditya Nur Pratama, SE NIP. 19861220 201012 1 001	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat

	Penyusun Bahan Pengadaan E-Katalog	Pengembangan Sistem Katalog
9.	Atmojo Heri Prasetyo, ST NIP. 19780902 201012 1 001 Penyusun Bahan Pengembangan Sistem <i>E-Procurement</i>	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
10.	Festiana Niyanti, S.Psi NIP. 19870727 201012 2 001 Penyusun Bahan Perumusan Standar Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Pengembangan Profesi
11.	Miftah Irfaniah, S.Pd.I, M. Pd NIP. 19821221 201012 2 001 Kepala Seksi Evaluasi Pelatihan	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Pelatihan Kompetensi
12.	Sigit Apriyanto, A.Md NIP. 19850401 201012 1 001 Pengolah Data Bahan Pengujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Sertifikasi Profesi
13.	Muhamad Dwi Sumanto, S.Sos NIP. 19870319 201012 1 001 Penyusun Bahan Advokasi Instansi Pemerintah Daerah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I
14.	Indah Suci Pratiwi, SE NIP. 19860602 201012 2 001 Penyusun Bahan Pelayanan Sanggah dan Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
15.	Anastasia Citra Puspita, SE NIP. 19850528 201012 2 001 Penyusun Bahan Bantuan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Instansi Pemerintah Daerah	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2013

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN,**



**EIKO WHISMULYADI**

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.